

**TATA KELOLA ASET BERGERAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(STUDI KASUS PENATAAN ALAT ANGKUTAN DAN ALAT-ALAT BERAT
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)**

Oleh

**Habri Ustila (1401112668)
habriustila@yahoo.com**

Pembimbing : Zaili Rusli

Jurusan Ilmu Administrasi - Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28293
Telp/Fax 0761-63272

Abstract

Regional assets are an important resource for local government as the main pillar of original income, therefore it is important for local governments to adequately manage local assets. In this study the authors limit the assets of the regions in question are movable assets in the form of transportation equipment and heavy equipment of the public works and spatial planning, moving assets in the form of equipment and heavy equipment needs special attention in the governance or management, related to the asset management according to Sugiyama (2013:15) interpreted as a science and art to guide wealth management that includes the process of planning the asset needs, obtaining inventory, performing legal audits, appraising, operating, maintaining, renewing or eliminating to transfer assets effectively and efficiently. This study aims to describe the management of moving assets in the form of transportation equipment and heavy equipment at the office work general and spatial planning of kuantan singing regency as well as factors affecting the governance of assets. The method used is qualitative descriptive data collection by observation, interview and documentation. The result of the study describe that the governance of moving assets on the public works department and spatial planning of kabupaten kuantan singing regency there are weaknesses in the planning for budget maintenance and maintenance of asset and standard operating procedures in the implementation of asset governance. Factual factors that influence the governance of assets, human resources, budgeting and standard operating procedures in asset settlement.

Keywords: Management, Asset, Assets Management

Latar Belakang

Alat berat dan alat angkutan merupakan potensi PAD yang cukup potensial, namun sumbangan retribusi tersebut masih sangat minim serta belum menunjukkan kontribusi yang cukup signifikan terhadap peningkatan PAD. Hal tersebut disebabkan oleh belum maksimalnya pengelolaan aset peralatan berat baik dari segi ketersediaan peralatan berat itu sendiri maupun dari segi berbagai pihak yang menjadi pengguna atau penyewa dari peralatan berat. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah bagaimana daerah dapat mengelola aset peralatan berat tersebut, sehingga peralatan berat tersebut dapat memberikan manfaat terhadap peningkatan PAD dari sektor retribusi.

Alat berat dan alat angkutan adalah aset dengan biaya pemeliharaan yang tinggi karena membutuhkan perawatan khusus. Selain itu onderdil yang mahal membuat aset yang satu ini rawan pencurian, sehingga membutuhkan pengawasan dari pihak terkait yang mengelola. Namun hal ini tentu saja berbanding lurus dengan potensi PAD yang dimiliki alat-alat ini jika dikelola dengan benar. Selain segi ekonomis alat berat dan alat angkutan juga mempunyai manfaat dan kegunaan yang luar biasa besar manfaatnya untuk masyarakat, misalnya saat terjadi bencana. Alat-alat ini akan sangat berguna untuk penanggulangan pasca terjadi bencana, membantu masyarakat serta timsar.

Berdasarkan pada fenomena permasalahan maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi fakta-fakta yang ada dilapangan dengan judul penelitian: **TATA KELOLA ASET BERGERAK DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

(STUDI KASUS PENATAAN ALAT ANGKUTAN DAN ALAT-ALAT BERAT PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi ?

Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a. Untuk mengetahui bagaimana tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tata kelola aset bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan diatas diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk pengembangan ilmu pengetahuan administrasi Negara khususnya untuk manajemen aset
 - b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti dan pihak lain yang ingin melanjutkan atau meneliti dengan

- kajian permasalahan yang sama.
2. Secara Praktis
Secara praktis diharapkan hasil penelitian ini bias digunakan sebagai bahan masukan atau referensi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi dalam melakukan tata kelola aset daerah, khususnya aset bergerak.

Konsep Teori

1. Manajemen

menurut G.R. Terry, (2014) mendefinisikan Manajemen merupakan suatu proses yang khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, mengerakkan, dan mengendalikan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.

Manajemen merupakan upaya mengatur sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen yang baik akan memudahkan terwujudnya tujuan yang ingin dicapai.

Teori manajemen berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Terry (2006) sebagai berikut;

1. Planning (Perencanaan) yaitu pengambilan keputusan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu/periode tertentu serta tahapan/langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.Perspektif kelancaran rutinitas dan tiadanya masalah

2. Organizing (Pengorganisasian) yaitu suatu proses dan rangkaian kegiatan dalam pembagian kerja yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan pekerjaan, yang baik diantara mereka, serta pemberian lingkungan dan fasilitas pekerjaan yang kondusif.
3. Actuating (Pengarahan) yaitu suatu rangkaian kegiatan untuk memberikan petunjuk atau intruksi dari seorang atasan kepada bawahan atau kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal dan untuk pencapaian tujuan bersama.
4. Controlling (pengawasan) merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tahapan yang harus dilalui.

2. Konsep Aset

Aset menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Yusuf (2015:164) harta kekayaan daerah atau aset daerah adalah segala benda, baik bergerak maupun tidak

bergerak, yang dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah. Pengertian dimiliki atau dikuasai oleh daerah tersebut dapat berupa penguasaan secara langsung oleh badan-badan hukum negara atau daerah. Pada tingkat pemerintah pusat dikuasai oleh departemen atau lembaga, sedangkan pada tingkat pemerintah daerah oleh dinas atau badan atau kantor.

Mahmud (2010:146) menyatakan bahwa aset daerah dapat di kategorikan menjadi dua yaitu:

1. Barang tidak bergerak yang meliputi tanah, bangunan gedung, bangunan air, jalan dan jembatan, instalasi, jaringan, serta monument atau bangunan bersejarah.
2. Barang bergerak, antara lain mesin, kendaraan, peralatan (meliputi: alat berat, alat angkutan, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor, dan rumah tangga, alat astudio, alat kedokteran, alat laboratorium dan alat keamanan), buku atau perpustakaan, barang bercorak kesenian dan kebudayaan, hewan atau ternak dan tanaman dan sebagainya.

3. Konsep Manajemen Aset

Manajemen aset merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya berkembang dan populer dimasyarakat. Manajemen aset adalah satu ilmu untuk memandu pengelolaan kekayaan negara atau daerah berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai sehingga tercapai tujuan pengelolaan aset daerah yaitu:

1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah, baik menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan daerah,

penghapusan dan penjualan aset daerah,

2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah,
3. Pengamanan aset daerah
4. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah kekayaan daerah.

Menurut Sugiama (2013:15) secara definitif manajemen aset adalah ilmu dan seni untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses merencanakan kebutuhan aset, mendapatkan, menginventarisasi, melakukan legal auditn menilai, mengoperasikan, memelihara, membaharukan atau menghapuskan hingga mengalihkan aset secara efektif dan efisien.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menjelaskan realitas masalah yang kompleks, dengan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan dengan cara menggambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada dilapangan. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif agar dapat memahami makna dibalik data yang tampak dan melakukan eksplorasi untuk memperjelas fenomena permasalahan yang terjadi.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilakukannya penelitian ini adalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. Alasannya, karena berdasarkan pantauan dilapangan saat ini di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singi terjadi

permasalahan yaitu tidak terkelolanya aset daerah berupa alat berat dan alat angkutan dengan benar. Hal ini ditunjukkan dengan adanya sejumlah alat berat rusak yang dibiarkan begitu saja .

3. Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan informasi dari narasumber yang kemudian disebut sebagai informan penelitian. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive* yang berarti bahwa informasi dipilih dengan Kriteria-kriteria atau ciri-ciri khusus sesuai dan memiliki kompetensi untuk memberikan informasi dan data, Informan dalam penelitian ini berasal dari internal Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi dan beberapa orang dari luar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan Singingi. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Bagian Bidang Aset BPKAD
- b. Sub Bagian Umum Dinas PUPR
- c. UPTD ALKAL
- d. Operator

4. Jenis dan Sumber Data

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber kedua atau

secara tidak langsung melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011, dokumen, laporan-laporan, buku-buku, jurnal dan data lainnya yang relevan dengan tujuan penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan penulis secara sistematis dan sengaja dilakukan dengan menggunakan alat indera terutama mata dan telinga terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung, dimana peneliti datang ketempat penelitian yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Kuantan singingi untuk melakukan pengamatan terhadap masalah yang terjadi. Dalam hal ini peneliti juga melakukan observasi awal untuk melihat masalah yang terjadi yang kemudian ditindak lanjuti dengan observasi yang lebih mendalam lagi mengenai manajemen aset daerah di Kabupaten Kuantan singingi.

2. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung dan dalam tidak berstruktur dan individual. Dengan wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena dapat menggali pemikiran atau pendapat secara detail. Wawancara tidak berstruktur adalah wawancara dimana pewawancara dapat dengan leluasa memberikan pertanyaan dari berbagai segi dan arah untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan mendalam. Wawancara tidak berstruktur sangat memadai dalam penelitian kualitatif.

6. Analisis Data

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis model interaktif. Menurut **Miles dan Huberman** dalam **Patilima (2011:100)** analisa model adalah interaktif ini memiliki tiga komponen analisis yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data sebagai suatu siklus.

1. Reduksi Data

Pada tahap ini dilakukan proses pemilihan, perumusan perhatian ada penyederhanaan, pengabstrakan dan informasi data yang muncul dari catatan-catatan lapangan sehingga menajamkan menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Penyajian data

Selanjutnya dilakukan penyajian data. Penyajian yang dimaksud adalah sekumpulan informasi tersusun yang member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang digunakan penelitian ini adalah teks naratif, dimana peneliti akan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam kesatuan bentuk yang disederhanakan dan selektif yang mudah dipahami.

3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Dari pengumpulan data, peneliti memulai mencari arti benda-benda, pola-pola penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan

proposisi. Kesimpulan terakhir tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulancatatan lapangan, pengkodean, penyimpangan dan metode pencairan ulang yang digunakan. Namun disini penarikan kesimpulan hanya sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Pembuktian kembali atau verifikasi dapat dilakukan untuk mencari pembenaran dan persetujuan sehingga validitas dapat tercapai.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1.1 Tata kelola aset bergerak oleh Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi

Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan permasalahan yang dapat menerangkan bagaimana pelaksanaan Tatakelola Aset Bergerak di Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus Penataan Alat Berat dan Alat Angkutan Pada Dinas PUPR). Untuk mengetahui bagaimana tatakelolanya, penulis menggunakan konsep teori yang dikemukakan oleh Sugiyama. Dimana dalam Pengelolaan Aset berpandangan ada 9 tahap siklus pengelolaan aset, yaitu:

a. Perencanaan kebutuhan aset, Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tugasnya dalam perencanaan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tahapan-tahapan dan proses perencanaan dilakukan sesuai prosedur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dan

- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang menjelaskan 3 alur proses perencanaan dan penganggaran BMD.
- b. Pengadaan aset, Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tugasnya dalam pengadaan aset dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pengadaan aset terakhir yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan sistem tender yang dilaksanakan berpedoman pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pelaksanaan dan proses pengadaan barang atau jasa melalui tender atau lelang.
 - c. Inventarisasi aset, inventarisasi aset tidak sepenuhnya dilakukan Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, inventarisasi aset dibantu oleh BPKAD sub bagian ASET Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam melakukan tugasnya pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi telah melaksanakan tugasnya dalam inventarisasi aset dengan cukup baik yaitu dengan pencatatan dan laporan berkala serta labeling dan kodefikasi aset, meskipun begitu inventarisasi aset yang dilakukan belum begitu baik karena tidak adanya SOP dengan alasan masih dalam proses penggodokkan, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan mengingat pentingnya SOP dalam Tata Kelola Aset sebagai tolak ukur atas kinerja atau pemanfaatan dari alat tersebut apakah sesuai dengan standar atau tidak.
 - d. Legal Audit, berhubungan dengan hal legal audit dalam Tata Kelola Aset di Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi yang melakukan legal audit tersebut adalah pihak independen yang paham yang mempunyai kuasa untuk melakukan legal audit yaitu pihak Inspektorat Jendral, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor pelaksanaan Penataan Kelola Aset pada Dinas PUPR Kabupaten Kuantan Singingi.
 - e. Penilaian aset, didalam hal penilaian aset yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi, yang melakukan penilaian terhadap BMD tersebut adalah pihak dari Direktorat Jenderal dan Keuangan Negara (DJKN).
 - f. Pengoperasian dan Pemeliharaan aset, saat ini pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi sudah melakukan pengoperasian dan pemeliharaan aset dengan baik sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset namun masih harus terus berbenah untuk tata kelola aset yang lebih baik karena terkendala beberapa hal yaitu SDM, anggaran dan SOP yang masih dalam proses penggodokkan.
 - g. Pembaharuan atau Rejuvenasi aset, upaya rejuvenasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dengan melakukan perbaikan, mengganti suku cadang pada alat berat atau alat angkutan yang rusak agar bisa tetap beroperasi dan dimanfaatkan.
 - h. Penghapusan aset, aset berupa alat berat dan alat angkutan yang berada di bawah pengawasan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah dilakukan penghapusan sehingga terjadi penumpukan aset yang rusak dan sudah tidak bisa digunakan lagi. Hal ini disebabkan rumitnya proses penghapusan dan keengganan para pihak terkait untuk pelaksanaan proses penghapusan, keengganan tersebut terjadi karena adanya resiko tanggung jawab kerugian Pemda bila dasar penghapusannya tidak kuat setelah diperiksa oleh auditor atau aparat penegak hukum.

- i. Pengalihan atau Pemindahtanganan melalui penjualan, pengibahan, penyertaan modal, atau pemusnahan aset, pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi belum pernah melakukan pengalihan atau pemindahtanganan aset.

1.2 Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Tata Kelola Aset Bergerak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia, dibutuhkan pembinaan terhadap petugas terkait didalam pengelolaan BMD yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi agar tatakelola lebih efektif dan efisien dalam aspek waktu, anggaran dan lainnya sehingga bisa lebih baik lagi dalam tata kelola BMD.
- b. Penghapusan aset, rumitnya proses penghapusan dan keengganan para pihak terkait untuk pelaksanaan proses

penghapusan karena resiko tanggungjawab kerugian Negara bila dasar oenghapusan tidak kuat setelah dilakukan pemeriksaan oleh auditor yang mempunyai kuasa dalam audit dan penetapan status aset menyebabkan penumpukan aset yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

- c. Anggaran, ketepatan perencanaan anggaran yang dialokasikan dalam hal melakukan perawatan terhadap BMD yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. Minimnya anggaran yang dialokasikan adalah salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan BMD.
- d. Standar Operasional Prosedur (SOP), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi belum mempunyai SOP sehingga mempengaruhi Tatakelola aset yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi. SOP adalah lemen penting untuk mencapai tata kelola BMD yang lebih baik.

KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan sebelumnya, penulis menyimpulkan bahwa Tata Kelola Aset Bergerak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi masih sangat perlu perbaikan karena dari indikator-indikator yang di teliti masih

banyak terdapat kekurangan-kekurangan, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki didalam pelaksanaannya dan harus berbenah didalam proses Tata Kelola BMD.

Seperti halnya SOP yang belum juga ada, perencanaan anggaran untuk pemeliharaan dan perawatan aset, dan beberapa indikator lainnya yang belum sesuai. meskipun masih banyak kekurangan untuk beberapa indikator seperti prosedur pengadaan dan atau pengadaan aset sudah sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang penulis uraikan diatas maka dapat direkomendasikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pembuatan SOP yang disegerakan agar Tata Kelola Aset yang lebih baik dapat tercapai dan adanya tindak lanjut terhadap aset-aset yang rusak atau tidak terpakai.
2. Perencanaan penganggaran perawatan dan pemeliharaan agar lebih diperhitungkan dalam penyusunan anggaran, hal ini dilakukan untuk menghindari overbudget jika terjadi kerusakan-kerusakan pada aset. Sehingga tidak terjadi lagi penelantaran aset yang rusak karena terkendala masalah anggaran.
3. Meningkatkan kualitas SDM dengan melakukan pembinaan terhadap pihak terkait yang bertanggung jawab atas BMD yang ada dan

DAFTAR PUSTAKA

Anshari, E.S. 2016. *Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah Terhadap Kualitas*

Laporan Keuangan Pemerintah Kota Padang. E-Journal Universitas Negeri Padang.

Dwiputrianti, Septiana. 2017. *Pengelolaan Aset Peralatan Berat Di Dinas Pekerjaan Umum Kota Gunung Sitoli.* E-Journal STIA LAN Bandung

Fertana, Endang (2013). *Manajemen Aset Kendaraan Dinas Roda Empat Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Merangin.* E-Journal Universitas Andalas

FH, KH. 2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang.* E-Journal Universitas Negeri Padang

Hilma, Firoza KH. 2013. *Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Dan Akuntansi Aset Tetap Pada DPKA Kota Padang.* E-Journal Universitas Negeri Padang

Kalangi, CLYD. 2017. *Analisis Pengelolaan Barang Milik Daerah di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Kabupaten Minahasa Utara).* E-Journal Universitas Sam Ratulangi.

Niu, FAL. 2017. *Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow.* E-Journal Unsrat. Universitas Samratulangi

Moleong.2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung:Remaja Rosda Karya.

Pauweni, Sherly. 2017. *Pengaruh Inventarisasi, Legal Audit, Penilaian dan Kondisi Aset terhadap Optimalisasi Pemanfaatan Aset pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango.* E-Journal Unsrat

- Sangaji, SM. 2018. *The Impact Of Asset Inventory On Legal Audit And Asset Valuation (Case Study At Bandung City Government)*. E-Journal BPK Jakarta
- Saraun, FMA. 2016. *Evaluasi Perencanaan Dan Pengadaan Aset Pada Bpkbmd Kabupaten Minahasa*. E-Journal Unsrat
- Siregar, D.D. 2004. *Manajemen Aset*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Siswanto, H.B. 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi.
- Soleh, Chabib dan Rochmansjah, Heru. 2010. *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah*. Bandung: Fokus Media.
- Sugiana A. Gima. 2013. *Manajemen Aset Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Sutarto. 2005. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: UGM Pers.
- Sutedi, Adrian. 2009. *Tinjauan Hukum Pertanahan*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Suwanda, Dadang. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat: Penerbit PPM
- Terry, George R. 2006. *Asas-asas Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Yusuf, M. 2015. *8 Langkah Pengelolaan Aset Daerah*. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Pekanbaru (*Studi Kasus Mobil Dinas*). Pekanbaru: pustaka FISIP.
<https://e-katalog.lkpp.go.id>
<http://www.RadarJakarta.com/berita-1974-lkpp-luncurkan-ekatalog-alat-berat-dan-bahan-pabrikasi.html>
<http://kuansingterkini.com//berita/detail/7714/2018/02/23/3-tahun-terlantar-dan-rusak-di-dhomasraya,-bpkad-berjuang-tarik-grader-ke-kuansing>
<http://www.jurnal.bpk.go.id/index.php/TAKEN/article/view/140/73>

Dokumen

- Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 13 Tahun 2011
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016

Karya Ilmiah dan Sumber Lain

- Ima, Nike. 2016 *Manajemen Aset Daerah Oleh Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota*